



RENJA 2026

PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN
BERKELANJUTAN

**RENCANA KERJA
TAHUN 2026**

PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN
Januari, 2026**



KEMENTERIAN KEHUTANAN
PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN
NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA
PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 88 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan tentang Rencana Kerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

5. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 698 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan 2026 digunakan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan tahun 2026.
 2. Pengendalian Program dan Kegiatan lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Januari 2026

KEPALA PUSAT,



GUN GUN HIDAYAT, S.Hut., M.Sc., Ph.D. 

Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan di Jakarta;
2. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan di Jakarta.

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis P2HB Tahun 2025–2029 serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Renja ini memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta rencana pendanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi P2HB dalam mendukung pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan.

Penyusunan Renja P2HB Tahun 2026 mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu *"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*, serta selaras dengan arah kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan yang menekankan pada penguatan birokrasi berdampak dan dukungan kebijakan berbasis bukti. Dalam kerangka tersebut, P2HB berperan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan, pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), serta penyediaan layanan laboratorium kehutanan yang mendukung implementasi kebijakan kehutanan secara efektif.

Pada tahun 2025, P2HB berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dengan capaian output kegiatan sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar 99,98 persen dari pagu efektif yang tersedia. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan serta menunjukkan peran aktif P2HB dalam mendukung penguatan tata kelola pembangunan kehutanan melalui rekomendasi kebijakan, pengelolaan KHDTK, dan layanan laboratorium kehutanan.

Memasuki tahun 2026, P2HB menargetkan peningkatan efektivitas penerapan kebijakan teknis kehutanan dengan indikator kinerja kegiatan sebesar 72 persen dan indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan sebesar 2 poin. Target tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama yang meliputi penyusunan 9 rekomendasi kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan, pengelolaan 14 unit KHDTK, serta 7 layanan laboratorium kehutanan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan hilirisasi hasil hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Renja Tahun 2026 ini, P2HB diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai unit pendukung kebijakan kehutanan yang menghasilkan rekomendasi berbasis data, meningkatkan pemanfaatan KHDTK sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran lapangan, serta memperkuat layanan laboratorium sebagai penyedia data ilmiah dalam mendukung kebijakan kehutanan yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi P2HB di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Renja P2HB Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis P2HB Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dengan tema *“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”*. Dokumen ini juga diselaraskan dengan arah kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan yang menekankan pada penguatan tata kelola pembangunan kehutanan melalui birokrasi yang berdampak serta penguatan dukungan kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah.

Sebagai unit kerja yang memiliki tugas dalam perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan, P2HB berperan dalam menyediakan rekomendasi kebijakan, mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), serta memberikan layanan laboratorium kehutanan yang mendukung pengembangan sektor kehutanan secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, P2HB diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung hilirisasi hasil hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta penguatan pemanfaatan hutan secara produktif dan lestari.

Renja ini memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta rencana pendanaan yang akan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan P2HB dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2026. Penyusunan dokumen ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika kebijakan pembangunan kehutanan yang terus berkembang.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan Renja ini memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian Kehutanan maupun para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak agar pelaksanaan program dan kegiatan P2HB Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen Renja P2HB Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.



Kepala Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

Gun Gun Hidayat, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sumber Daya Manusia	3
1.5 Sarana dan Prasarana	5
1.6 Isu Strategis	6
BAB II. CAPAIAN KERJA TAHUN 2025	
2.1 Capaian P2HB Terhadap Target Kementerian	8
2.2 Capaian P2HB Terhadap Target Capaian Anggaran Tahun 2025	15
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2026	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	16
3.2 Peta Strategi P2HB	18
3.3 Target Kegiatan 2026	18
3.4 Pendanaan 2026.....	22
BAB IV. PENUTUP	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Matriks Capaian Kinerja Program P2HB Tahun 2025.....	8
Tabel 2.	Matriks Capaian Kinerja Kegiatan P2HB Tahun 2025.....	10
Tabel 3.	Hasil Rekomendasi Kegiatan P2HB Tahun 2025.....	11
Tabel 4.	Serapan Anggaran Tahun 2025.....	15
Tabel 5.	IKP P2HB Tahun 2026.....	18
Tabel 6.	IKK P2HB Tahun 2026.....	19
Tabel 7.	Indikator Kinerja P2HB 2026.....	19
Tabel 8.	Pendanaan P2HB Tahun 2026.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	2
Gambar 2	Sebaran SDM berdasarkan Jenis Pegawai.....	3
Gambar 3	Sebaran SDM berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Gambar 4	Sebaran SDM Tahun 2026 berdasarkan Golongan.....	4
Gambar 5	Sebaran Jabatan Fungsional.....	4
Gambar 6	Sarana Prasarana Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan.....	5
Gambar 7	KHDTK dan HP P2HB.....	5
Gambar 8	Laboratorium yang Dikekola P2HB.....	6
Gambar 9	Capaian Kinerja P2HB Tahun 2025.....	11
Gambar 10	PNBP KHDTK dan Laboratorium Tahun 2022 – 2025.....	13
Gambar 11	Tim Lab Anatomi Lignoselulosa-Xylarium Membantu Proses Identifikasi Kayu.....	14
Gambar 12	Dukungan Arah Kebijakan P2HB terhadap Prioritas Nasional	17
Gambar 13	Peta Strategi P2HB.....	18
Gambar 14	Arsitektur Kinerja P2HB	21
Gambar 15	Pagu P2HB Tahun 2026 berdasarkan Jenis Belanja	22

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kehutanan nasional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan menempatkan hutan tidak hanya sebagai penyangga sistem kehidupan, tetapi juga sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah, ketahanan pangan dan energi, serta penyedia jasa lingkungan, khususnya sumber daya air. Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan kehutanan harus disusun secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan, dengan menjadikan tata kelola (governance) sebagai fondasi utama.

Pembangunan kehutanan 2026 mengusung semangat “Aktualisasi hutan untuk pangan, energi, sumber daya air, dan hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah” selaras dengan tema pembangunan nasional tahun 2026 “Kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif”. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi hasil melalui transformasi birokrasi yang mendorong pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan Renstra P2HB Tahun 2025–2029, serta merupakan kelanjutan dari Renja P2HB Tahun 2025. Sebagai satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Renja P2HB Tahun 2026 secara substansial mengacu dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026, khususnya dalam kerangka tema besar penguatan birokrasi yang berdampak.

Tema pembangunan Sekretariat Jenderal Tahun 2026, yaitu “*Aktualisasi birokrasi untuk ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan*”, menjadi landasan penting bagi P2HB dalam merumuskan arah kebijakan dan kegiatan. Dalam kerangka ini, P2HB berperan sebagai unit kerja yang menguatkan dimensi substantif pengembangan hutan berkelanjutan melalui penyusunan rekomendasi, pengembangan model, pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), serta dukungan data dan laboratorium yang berorientasi pada outcome dan dampak.

Penyusunan Renja P2HB Tahun 2026 dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning) yang menekankan pada keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan kegiatan. Pendekatan ini sejalan dengan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi berdampak yang menjadi agenda prioritas pemerintah.

Selain itu, penyusunan Renja juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, dinamika kebijakan kehutanan, serta masukan dari unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, Renja P2HB Tahun 2026 diharapkan mampu menjawab kebutuhan aktual organisasi sekaligus adaptif terhadap perubahan kebijakan. Pendekatan partisipatif dan koordinatif juga menjadi prinsip dalam penyusunan Renja ini, guna memastikan keterpaduan antara perencanaan P2HB dengan perencanaan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kehutanan.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Kedudukan

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) merupakan Eselon II yang berada di bawah Satuan Kerja lingkup Sekretariat Jenderal. Kepala P2HB bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Tugas Pokok

P2HB mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, P2HB menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan;
2. Pelaksanaan perencanaan, formulasi, dan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan;
3. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK);
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan hutan berkelanjutan serta pengelolaan laboratorium dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK); dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (sumber: Permenhut No.1 Tahun 2024)

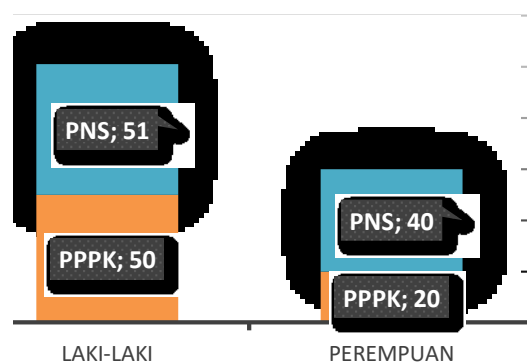
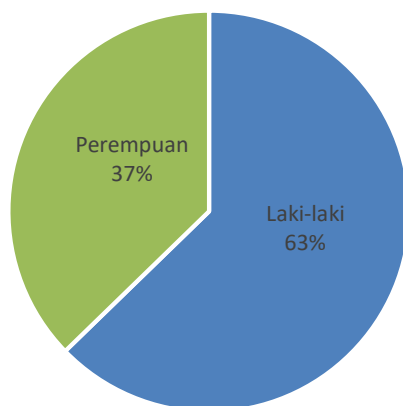
<p>Bidang Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan.</p>	<p>Bidang Fasilitas Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitas penerapan pengembangan hutan berkelanjutan serta pengelolaan laboratorium dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).</p>
---	--

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Berkelanjutan (P2HB) per Desember 2025 tercatat sebanyak 161 orang, terdiri dari 91 orang PNS dan 70 orang PPPK. SDM P2HB ini tersebar di kantor Gunung Batu, kantor Laboratorium Sutera Alam Indonesia (LSAI) dan di lapangan

(Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus dan Unit Pengembangan Hutan Kerjasama) yang berlokasi di sekitar Bogor, Kab. Pandeglang Banten, dan Kab. Bandung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, sampai dengan Nusa Tenggara Timur.

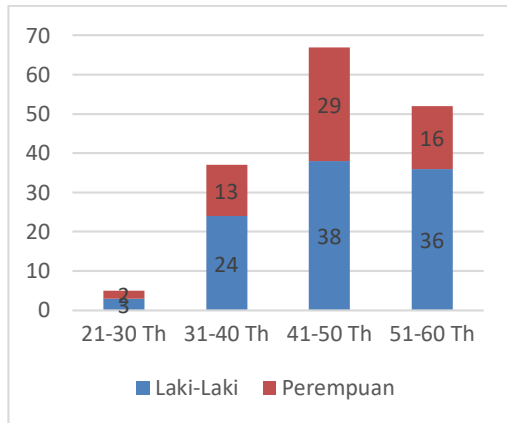


Gambar 2. Sebaran SDM berdasarkan Jenis Pegawai dan Gender

Berdasarkan pemilahan gender, pegawai P2HB terdiri dari 101 orang laki-laki (51 PNS; 50 PPPK) dan 60 orang perempuan (40 PNS; 20 PPPK). Dominasi laki-laki (63%) dipengaruhi area pengelolaan P2HB yang cukup luas dan tersebar, terutama di

lapangan sehingga dibutuhkan para penjaga dan pengelola KHDTK dan unit pengembangan hutan kerjasama yang cukup banyak.

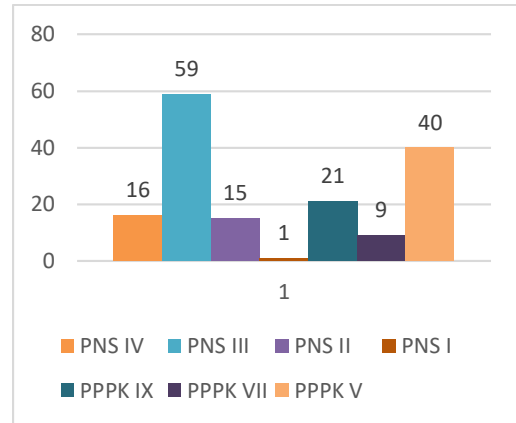
Sebaran pegawai P2HB berdasarkan usia menunjukkan usia yang beragam. Jika dikelompokkan dalam 4 (empat) rentang usia terlihat pada kelompok usia pegawai terbanyak berada pada rentang usia 41-50 tahun adalah yang terbesar, yaitu sebanyak 67 orang dan rentang usia terendah pada 21-30 tahun sebanyak 5 orang.



Gambar 3. Sebaran SDM berdasarkan Kelompok Umur & Jenis Kelamin

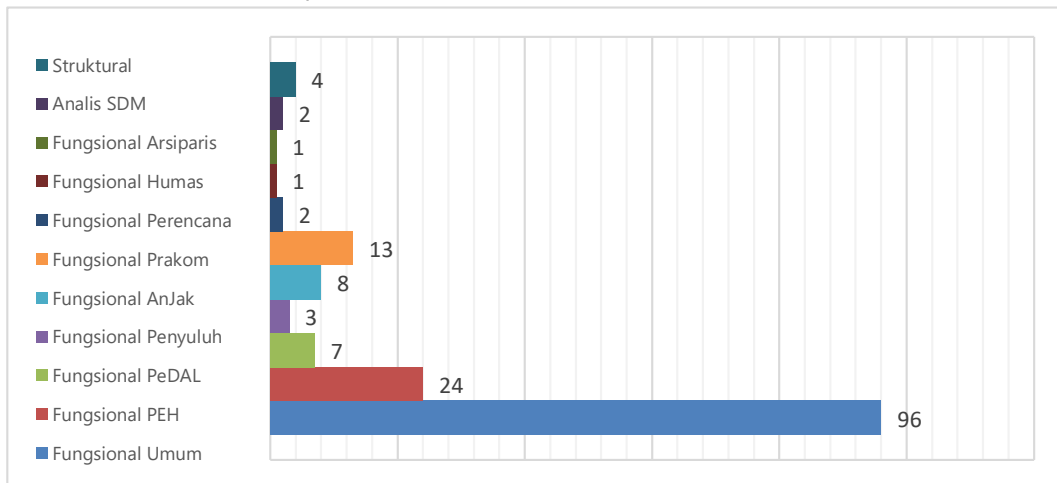
Struktur birokrasi pada PNS dibagi berdasarkan pangkat dan golongan yang dipengaruhi oleh waktu pengabdian, diklat jabatan yang diikuti, kompetensi pendidikan, serta prestasi PNS yang bersangkutan. Berdasarkan data terpilah menurut

golongan, SDM P2HB terdiri dari Golongan IV (16 Orang), Golongan III (59 Orang), Golongan II (15 Orang) dan Golongan I (1 orang). Sedangkan untuk tenaga PPPK terbagi dalam Golongan IX (21 orang), Golongan VII (9 orang), dan Golongan V (40 orang).



Gambar 4. Sebaran SDM Berdasarkan Golongan

Sebanyak 123 Orang di P2HB terbagi kedalam struktur yang lebih "ramping". Struktur tersebut terdiri dari Jabatan Struktural (4 Orang), Jabatan Fungsional Tertentu (68 Orang), dan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana (55 Orang).



Gambar 5. Sebaran Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Tertentu lingkup P2HB terdiri dari Perencana, Analis Kebijakan, Penyuluh Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis. Jabatan Fungsional Tertentu terbanyak di P2HB tahun 2026 adalah

Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sebanyak 24 orang, selanjutnya adalah Pranata Komputer sebanyak 13 orang, sisanya memiliki sebaran jumlah yang cenderung merata.

1.5. SARANA DAN PRASARANA



Gambar 6. Sarana Prasarana P2HB pada Komplek Kampus Gunung Batu

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan mengelola areal sekitar 102.543 m² di areal gunung batu yang terdiri dari kultur jaringan, persemaian KOFFCO, Silvikultur, Herbarium, Penangkaran Rusa, Tugu Rimbawan, Mesjid Nurul Ihsan, Lab INTROFF-CC, gedung R. Soediarjo, kantin Sylva, Poliklinik, gedung Penggergajian kayu, gedung pengawetan kayu, Galeri FORPRO, gedung penyimpanan kayu, Xylarium Bogoriense, gedung utama P2HB, lab terpadu, lab keteknikan dan areal Laboratorium Sutera Alam Indonesia seluas 4.000 m². P2HB juga memiliki areal pengelolaan KHDTK dan HP yang tersebar mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Masing-masing lokasi KHDTK dan unit hutan pengembangan kerjasama minimal memiliki werkit (pondok kerja). Selain

sarana tersebut P2HB juga memiliki beberapa peralatan pendukung seperti drone, GPS, PC, laptop, printer, genset, kendaraan roda tiga, kendaraan roda empat (minibus, sedan, jeep dan pick up), dan kendaraan roda dua (motor).

LABORATORIUM. Laboratorium P2HB terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: Laboratorium Non-Lapangan dan Laboratorium Lapangan.



Gambar 7. Laboratorium yang dikelola P2HB

Laboratorium Non-Lapangan merupakan laboratorium kehutanan yang memiliki tuisi sebagai unit layanan publik yang menyelenggarakan layanan melalui kegiatan uji laboratorium, khususnya untuk pengujian komoditas hasil hutan, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau komoditas lain sejenis.

Laboratorium Non-Lapangan terdiri dari (a) Laboratorium Anatomi Lignoselulosa, Xylarium dan Herbarium; (b) Laboratorium

Biologi dan Teknologi Pengawetan; (c) Laboratorium Kimia Hasil Hutan dan Bioenergi; dan (d) Laboratorium Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK.

Laboratorium Anatomi Lignoselulosa, Xylarium, dan Herbarium berfokus pada pengujian identifikasi kayu, bambu, rotan, dan identifikasi herbarium, dengan koleksi autentik sebagai acuan utama dalam pengujian. Perawatan dan penataan koleksi beserta database menjadi bagian penting dari kegiatan laboratorium tersebut. Laboratorium Biologi dan Teknologi Pengawetan menguji produk hasil hutan, khususnya uji pengawet CCB dan uji keawetan kayu dengan metode rayap. Laboratorium Kimia Hasil Hutan dan Bioenergi berfokus pada pengujian produk kayu seperti arang, briket arang, arang tempurung, arang aktif dan kayu. Laboratorium kimia hasil hutan bersama dengan laboratorium anatomi lignoselulosa, telah terakreditasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017. Laboratorium Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK bertugas menguji sifat fisik dan mekanik kayu. Semua pengujian dilakukan dalam skema PNPB sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KHDTK. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 403 tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Penunjukan Pengelola Sementara Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Eks Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan mengelola 14 (empat belas) unit KHDTK seluas 12.172,75 Ha yang terdiri dari 9 (sembilan) KHDTK total luas 11.695,3 Ha dan 5 (lima) Unit Hutan Pengembangan Kerjasama total luas 549,32 Ha. KHDTK-HP ini tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Lokasi tersebut mewakili berbagai kondisi lingkungan yang berbeda dan di dalamnya telah diintroduksi berbagai jenis pohon baik jenis pohon asli Indonesia maupun jenis-jenis pohon eksotik.



Gambar 8. KHDTK dan Unit Hutan Pengembangan Kerjasama P2HB

1.6. ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan fase transisi penting bagi P2HB dari penguatan fondasi kelembagaan menuju penerapan awal peran strategis sebagai pendukung kebijakan kehutanan. Pada fase ini P2HB dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa dukungan kebijakan yang diberikan tidak

hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumberdaya hutan, keberlanjutan proses pengelolaan, keberlanjutan hasil pemanfaatan, serta keberlanjutan ekosistem hutan dalam kerangka transformasi utama pembangunan kehutanan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, arah kebijakan Renstra P2HB Tahun 2025–2029, serta dinamika kebijakan pembangunan kehutanan dan tata kelola pemerintahan, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan P2HB dalam penyusunan Renja Tahun 2026, yaitu:

1. Belum optimalnya pemanfaatan rekomendasi/model pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai pendukung kebijakan kehutanan.
Model yang dikembangkan P2HB perlu semakin diarahkan untuk mendukung kebijakan yang menjamin keberlanjutan sumber daya hutan, proses pengelolaan, hasil pemanfaatan, dan keseimbangan ekosistem secara terpadu.
2. Belum optimalnya pemanfaatan KHDTK dan laboratorium sebagai sarana pembelajaran dan validasi kebijakan kehutanan berkelanjutan.
Pengelolaan KHDTK dan laboratorium P2HB masih perlu diperkuat agar hasil pembelajaran lapangan dan validasi data dapat dimanfaatkan secara sistematis sebagai dasar penyempurnaan kebijakan kehutanan.
3. Belum terintegrasinya pengelolaan pengetahuan kehutanan untuk mendukung kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif.
Beragam sumber pengetahuan internal dan eksternal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, keanekaragaman hayati, dan transformasi digital belum sepenuhnya terkelola dalam satu kerangka yang berkelanjutan dan berorientasi kebijakan.
4. Belum kuatnya keterkaitan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan penyempurnaan kebijakan kehutanan berkelanjutan.
Informasi hasil pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memastikan kesinambungan kebijakan kehutanan yang seimbang antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
5. Penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja.
Sejalan dengan penguatan SAKIP dan pendekatan perencanaan berbasis kinerja, P2HB perlu memastikan bahwa perencanaan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja terintegrasi secara utuh dan konsisten.



BAB II

CAPAIAN KERJA 2025

2.1. CAPAIAN P2HB TERHADAP TARGET KEMENTERIAN

Capaian Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029 Dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja Program

Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan teknis dan tematik Kementerian Kehutanan dapat dilaksanakan.

Sementara itu kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 adalah kebijakan tematik pembangunan kehutanan yang dilaksanakan tahun 2025-2029 oleh P2HB adalah Pengembangan hutan berkelanjutan yang akan mendukung transformasi pertumbuhan ekonomi kehutanan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan hilirisasi kayu log, getah pinus dan aren untuk bioethanol;

Indeks implementasi kebijakan kehutanan merupakan rerata dari pengukuran indeks kinerja kegiatan efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati, pengukuran indeks kinerja kegiatan efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan termasuk cadangan pangan, energi, dan peningkatan kemandirian desa.

Penentuan nilai indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan dengan mengkonversi persentase yang dihasilkan melalui efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Penilaian konversi IKK menjadi IKP tersebut sebagai berikut :

- IKP 1 poin (IKK 70 - < 72%)
- IKP 2 poin (IKK 72 - < 74%)
- IKP 3 poin (IKK 72 - < 74%)
- IKP 4 poin (IKK 74 - < 76%)
- IKP 5 poin (IKK > 78%)

Penilaian ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan tematik kementerian dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan kehutanan.

Berdasarkan hasil penghitungan IKK didapatkan hasil penghitungan efektivitas penerapan kebijakan teknis didapatkan 70,45% maka tahun 2025 P2HB telah **mencapai target implementasi kebijakan sebesar 1 poin.**

Tabel 1. Matriks Capaian Kinerja Program P2HB Tahun 2025

PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN				
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis Kementerian	Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional	Poin	1	1

Capaian Efektivitas Penerapan Kebijakan Teknis Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan, Hilirisasi Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program pengelolaan hutan berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas kebijakan teknis kehutanan, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) pada tahun 2026 melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan. Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, aplikatif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung hilirisasi industri kehutanan, peningkatan daya saing produk hasil hutan, ketahanan pangan, serta penguatan tata kelola sumber daya hutan.

Berdasarkan target yang ditetapkan Renstra 2025-2029 P2HB menghasilkan 9 (Sembilan) Rekomendasi Kebijakan, mengelola 14 Unit KHDTK, dan 7 Layanan Laboratorium Kehutanan. Capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan target yang direncanakan dalam Renstra P2HB tahun 2025-2029, dimana seluruh kegiatan memiliki persentase capaian output 100%.

Kegiatan dilaksanakan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder dan primer, kajian teknis, diskusi kelompok terarah dengan pemangku kepentingan, serta perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hasil kegiatan berupa delapan rekomendasi kebijakan strategis yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi unit teknis dan pemangku kepentingan terkait dalam perumusan dan implementasi kebijakan kehutanan.

Kebijakan yang dinilai P2HB tahun 2025 berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan
 - a) Implementasi kebijakan Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Permenhut Nomor 163 Tahun 2003)
 - b) Implementasi kebijakan Optimalisasi PNBP berdasarkan Harga Patokan (Permenhut Nomor P.2 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak)
2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - a) Implementasi kebijakan pemantauan Pertumbuhan Riap Tegakan Hutan khususnya terkait dengan pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) pada PBPH (SK Menteri Kehutanan Nomor 237 Tahun 1995)
 - b) Implementasi kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola P2HB
3. Hilirisasi
 - a) Implementasi kebijakan Hilirisasi Getah Pinus
 - b) Implementasi kebijakan Layanan Pengujian Laboratorium Kehutanan

Selain Kebijakan di UKE I lain, P2HB juga melaksanakan exercise penilaian terhadap 2 (dua) kebijakan internal di P2HB, yaitu:

1. Implementasi kebijakan Pembangunan Technical Knowledge Management Hub (TKMH) Kehutanan
2. Implementasi kebijakan Penugasan Pengelolaan Standar dan Instrumen Kementerian Kehutanan oleh P2HB

Penilaian terhadap implementasi kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan metode Penilaian berdasarkan kesepakatan Pusat-Pusat Pengembangan, meliputi 2 (dua) dimensi berupa (1) Implementasi Kebijakan dan (2) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai implementasi kebijakan yang cukup rendah, ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di lapangan harus selalu dipantau dan perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Target capaian implementasi kebijakan bidang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2025 adalah sebesar 70%. Target ini telah dicapai pada implementasi kebijakan Pemantauan Pertumbuhan Riap

Tegakan Hutan khususnya terkait dengan pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) pada PBPH dengan nilai **70,45%**. Rekomendasi dari penilaian implementasi kebijakan PUP ini adalah :

1. Perlu dilakukan revisi SK Menhut 237 tahun 1995 (kebijakan pembaruan); Kebijakan perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan updating dan sinkronisasi dengan perubahan nomenklatur, kebijakan teknis pengelolaan/pemanfaatan hutan dan hasil hutan, dan tata lembaganya (proses bisnis pembaruan)
2. Rekomendasi nilai riap dari pembangunan PUP dapat menjadi dasar penetapan jatah tebangan per PBPH secara signifikan dan terukur serta diakui oleh pemangku kepentingan dan lembaga independen (Forest Stewardship Council - FSC).
3. Membangun mekanisme yang jelas, mudah diakses, dan tersedia dokumentasi konsultasi publik, melalui penambahan komponen pengelolaan PUP pada pengembangan website SIPASHUT (Ditjen PHL).

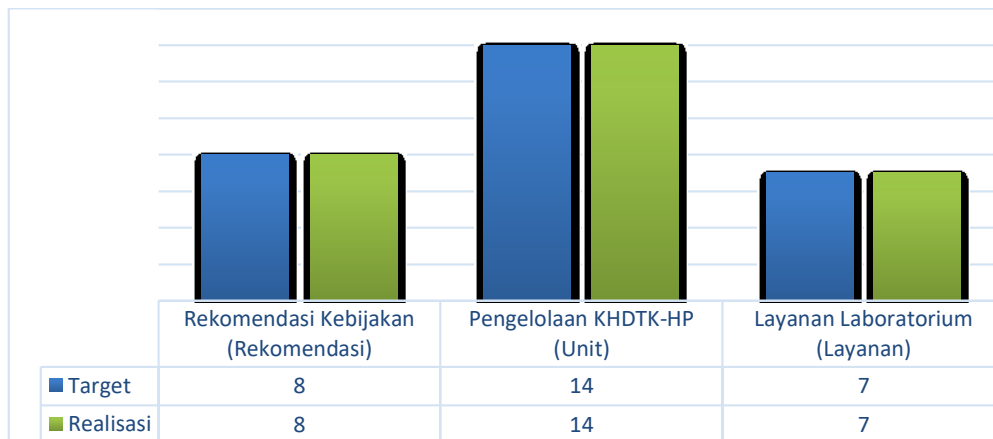
Tabel 2. Matriks Capaian Kinerja Kegiatan P2HB Tahun 2025

KEGIATAN : PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat	Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	70	70,45

Capaian Kinerja Kelompok Rincian Output (RO)

Pada tingkat ketercapaian output, target kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 dapat direalisasikan secara penuh. Seluruh output berupa dokumen perencanaan dan penganggaran

yang ditetapkan sebagai target kinerja telah dihasilkan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, dari perspektif kinerja berbasis output, kegiatan ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.



Gambar 9. Capaian Kinerja P2HB Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Kelompok Rincian Output (KRO) P2HB Tahun 2025, secara umum pelaksanaan kegiatan P2HB menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan seluruh target output berhasil direalisasikan **100 persen** sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada KRO **ABV. Kebijakan Bidang Kehutanan**, P2HB berhasil memenuhi seluruh target rekomendasi kebijakan yang ditetapkan. KRO ini mencakup rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan, perencanaan dan formulasi pengembangan

kehutanan, fasilitasi penerapan pengembangan kehutanan, serta koordinasi dan evaluasi pengembangan hutan berkelanjutan. Seluruh sub-output pada KRO ini mencapai target yang direncanakan, dengan total realisasi **8 rekomendasi kebijakan**, yang menunjukkan efektivitas peran P2HB dalam mendukung perumusan kebijakan kehutanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan hilirisasi. Kegiatan dan output yang dihasilkan dari KRO ABV. Kebijakan Bidang Kehutanan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Rekomendasi Kegiatan P2HB Tahun 2025

NO	KEGIATAN	HASIL REKOMENDASI
1.	Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan
2.	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP)	Rekomendasi revisi/pembaruan kebijakan pengelolaan PUP PBPH SK. 237 tahun 1995 tentang Pemantauan pertumbuhan dan riap tegakan hutan

NO	KEGIATAN	HASIL REKOMENDASI
3.	Pengelolaan Technical Knowledge Management Hub (TKMH)	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Jembatan/Hub Pengetahuan dan Kerjasama
4.	Kajian tentang Kewajiban Identifikasi Jenis (Kayu) dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan (Kayu) Berorientasi Ekspor Fasilitas penerapan pengembangan kehutanan.	Rekomendasi Kebijakan Kesesuaian Nama Dagang sesuai Jenis Penggunaan yang Berimplikasi terhadap Penerimaan Negara
5.	Profiling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu	Rekomendasi kebijakan Optimalisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
6.	Keanekaragaman Sumber Pangan Hutan : Studi Awal di KHDTK Carita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi kebijakan Penguatan basis data pangan hutan 2. Rekomendasi Kebijakan Integrasi pangan hutan dalam pengelolaan hutan multifungsi 3. Rekomendasi Kebijakan Penguatan pengetahuan lokal dan transfer pengetahuan 4. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk pangan hutan
7.	Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian (HP)	<p>Rekomendasi Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan HP Sobang sebagai lokasi percontohan pengembangan aren berbasis hutan penelitian. 2. Memperkuat integrasi antara BPTH, lembaga riset, dan industri energi dalam satu rantai nilai aren. 3. Mendorong skema kemitraan inklusif antara pengelola hutan, masyarakat lokal, dan BUMN energi. 4. Mengembangkan hilirisasi produk HHBK aren, khususnya gula aren dan turunannya, sebagai penyangga ekonomi sebelum fase bioenergi.
8.	Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk Optimalisasi Rantai Nilai Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi khusus mengenai laboratorium kehutanan 2. Efisiensi layanan dan pengelolaan 3. Modernisasi peralatan dan sistem manajemen laboratorium, 4. Penguatan sistem mutu (akreditasi), 5. Jejaring dan kolaborasi lintas sektor (shared facility, riset kolaboratif) 6. Integrasi dalam rantai nilai kehutanan, pusat rujukan nasional 7. Branding layanan laboratorium unggulan

Selanjutnya, pada KRO CDK-OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, P2HB menargetkan pengelolaan 14 unit KHDTK Litbang

Kehutanan Lestari bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan. Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan memiliki 14 (empat belas) KHDTK-HP yang wajib dikelola sesuai

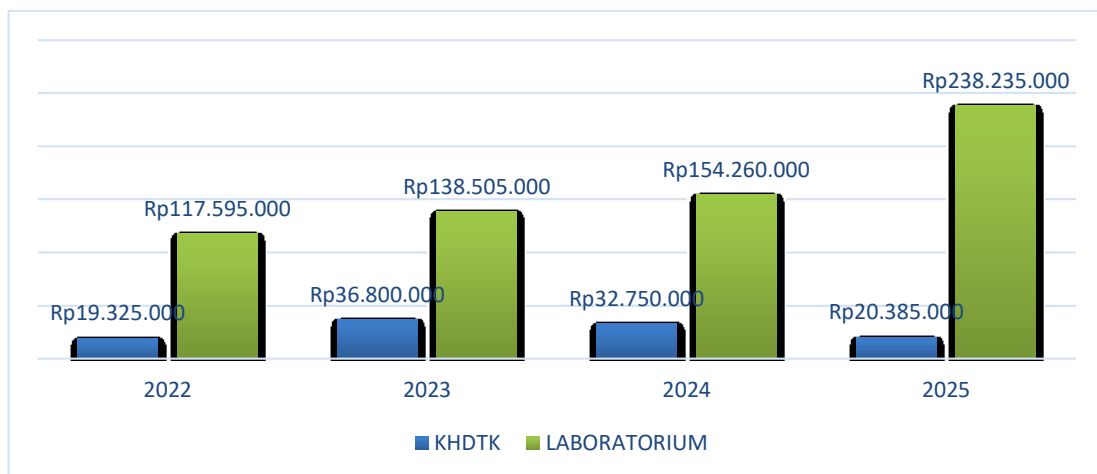
dengan mandat yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 403 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sementara KHDTK Eks BSILHK. Seluruh unit KHDTK tersebut berhasil dikelola dan dimanfaatkan sesuai rencana, dengan tingkat realisasi mencapai **100 persen**. Capaian ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan KHDTK sebagai sarana pengembangan, percontohan, dan pendukung kegiatan pengembangan hutan berkelanjutan.

Kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan diantaranya Penataan Kelembagaan, peningkatan kompetensi penjaga KHDTK dan HP berupa *In House Training Security & Safety* bagi petugas lapangan KHDTK dan HP terkait aspek-aspek pengamanan dasar serta peraturan perundangan yang terkait dengan pengamanan, pelatihan penilaian *Carbon, Biodiversity, Social-Culture (CBSC)*, expose KHDTK, dll. KHDTK telah berkontribusi terhadap KHDTK, pendapatan berasal dari kunjungan dan identifikasi Herbarium (akun 425619 – Jasa Lainnya).

Pada KRO RDK-OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, P2HB menargetkan penyediaan layanan laboratorium kehutanan bidang pengembangan hutan berkelanjutan. Target sebanyak **7 layanan laboratorium** berhasil direalisasikan seluruhnya. Realisasi tersebut mencakup layanan laboratorium terpadu dan laboratorium lapangan, yang berperan penting dalam mendukung kegiatan pengembangan, pengujian, dan penyediaan data teknis berbasis bukti (*evidence-based*).

Laboratorium terpadu berperan sebagai unit pelayanan publik dengan menyelenggarakan layanan pengujian sampel melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan Desember 2025, laboratorium telah melayani 182 pelanggan uji dengan total sample uji sebanyak 634 sampel.

Laboratorium telah berkontribusi pada PNBP sebesar Rp. 238.235.000,- (akun 425282 – Jasa Laboratorium). Capaian ini telah melebihi target PNPB yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 110.690.000,-. Jumlah PNBP tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya, data dapat dilihat pada gambar3.



Gambar 10. PNBP KHDTK dan Laboratorium Tahun 2022 – 2025

Laboratorium berperan sebagai Pusat Rujukan Kehutanan dengan mandat strategis dalam mendukung penanganan dan penegakan hukum di sektor kehutanan. Hal ini dibuktikan melalui Tim Laboratorium Anatomi Lignoselulosa yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi kayu sebagai bagian dari upaya penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya serta mendukung tindak penegakan hukum pada kejadian bencana tersebut. Identifikasi anatomi kayu menjadi krusial untuk menentukan jenis kayu yang terbawa hanyut pada saat bencana, data tersebut akan membantu lebih jauh dalam proses penyelidikan atau penyidikan pihak yang berwenang dalam penegakan hukum. Hasil

identifikasi laboratorium digunakan sebagai alat bukti ilmiah dalam proses hukum, sekaligus memperkuat kredibilitas aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran.

Lebih jauh, spesimen rujukan dari Xylarium Bogoriense yang diakui secara nasional maupun internasional, sehingga hasil analisis memiliki validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran ini menegaskan bahwa laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium uji semata, tetapi juga memegang peranan sebagai otoritas ilmiah yang mendukung kebijakan kehutanan, memastikan bahwa pengelolaan hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan hukum yang berlaku.



Gambar 11. Tim Lab Anatomi Lignoselulosa-Xylarium membantu proses identifikasi kayu

Secara keseluruhan, capaian KRO P2HB Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan. Tingkat capaian sebesar **100 persen pada seluruh KRO** mencerminkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian kinerja, serta mendukung kontribusi P2HB dalam penguatan tata kelola pembangunan kehutanan dan reformasi birokrasi berdampak di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

2.2. CAPAIAN P2HB TERHADAP TARGET CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Pagu Indikatif tahun 2025, P2HB mendapat anggaran sebesar Rp.50.837.652.000 (Lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dimana di dalamnya mencakup anggaran balai-balai eks BSILHK. Sehubungan dengan perubahan instansi dan tuisi P2HB, sesuai dengan Memorandum Sekretaris Jenderal No. M.10/Sekjen/Rocan/Ren.1/5/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Penataan Anggaran lingkup Sekretaris Jenderal Tahun 2025 Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.14.326.153.000,- dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp.6.698.853.000,- sehingga pagu efektif P2HB adalah sebesar Rp.7.626.300.000,-. Rincian rincian alokasi RM sebesar Rp. 5.946.708.000,- dan PNPB sebesar Rp. 1.679.592.000,-.

Realiasi anggaran P2HB per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.624.825.744,- (99,98%) dengan rincian realisasi RM sebesar Rp. 5.945.871.521,- (99,99%) Rp. 1.678.954.322,- (99,96%).

Tabel 4. Serapan Anggaran Tahun 2025

RINCIAN OUTPUT	(x Rp. 1.000)				%
	ALOKASI ANGGARAN	PAGU SETELAH EFISIENSI	PROGNOSIS	REALISASI	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan					
ABV.001. Rekomendasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan	2.388.682	846.362	840.925	845.567	99,91
CDK OP.001. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	4.012.587	765.807	762.500	765.513	99,96
RDK OP.001. Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	2.400.988	491.235	489.721	491.187	99,99
Jumlah Non Operasional	8.802.257	2.103.404	2.093.146	2.102.267	99,95
Program Dukungan Manajemen					
EBA.994. Layanan Perkantoran	5.522.896	5.522.896	5.491.149	5.522.457	99,99
Jumlah Operasional	5.522.896	5.522.896	5.491.149	5.522.457	99,99
TOTAL	14.326.153	7.626.300	7.612.895	7.612.895	99,98



BAB III

RENCANA KERJA 2026



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan melalui penguatan tata kelola pembangunan kehutanan yang berorientasi pada hasil dan dampak. Sebagai satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal, P2HB berperan dalam menyediakan dukungan substantif berupa rekomendasi, pengembangan model, serta layanan teknis yang mendukung perumusan dan implementasi kebijakan kehutanan.

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2026, arah kebijakan P2HB difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas rekomendasi dan dukungan kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung agenda hilirisasi hasil hutan serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air;
2. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai sarana pengembangan, percontohan, dan pembelajaran dalam rangka mendukung implementasi kebijakan kehutanan;
3. Penguatan dukungan layanan teknis, data, dan laboratorium sebagai bagian dari penyediaan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*);
4. Penguatan tata kelola kinerja dan akuntabilitas organisasi, melalui peningkatan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam rangka mendukung implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi berdampak.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi P2HB Tahun 2026 dilaksanakan melalui:

1. Penyelarasan kegiatan P2HB dengan KRO dan RO sebagaimana ditetapkan dalam Renstra P2HB Tahun 2025–2029, sehingga kontribusi kinerja dapat terukur secara jelas;
2. Penajaman fokus kegiatan pengembangan hutan berkelanjutan yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi hasil hutan melalui pemanfaatan KHDTK dan dukungan layanan teknis;
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan KHDTK dan fasilitas pendukung, termasuk laboratorium, melalui perencanaan pemanfaatan yang terarah dan peningkatan kualitas layanan;
4. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja sebagai dasar peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan perbaikan berkelanjutan;
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit teknis terkait.

VISI P2HB. “Menjadi Pusat unggulan rekomendasi kebijakan dan inovasi kehutanan berbasis pengembangan hutan berkelanjutan”.

MISI P2HB. Selaras dengan misi Sekretariat Jenderal, misi Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan kehutanan berbasis data dan analisis spasial untuk memperkuat tata kelola kehutanan.
2. Mengembangkan model pengelolaan KHDTK berkelanjutan .
3. Mendorong hilirisasi hasil hutan untuk peningkatan nilai ekonomi.
4. Memperkuat layanan laboratorium kehutanan yang berkualitas.

- Menjadi penghubung antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS P2HB.

Tujuan P2HB yaitu:

- Menghasilkan rekomendasi kebijakan kehutanan yang mudah diimplementasikan dan berdampak positif.
- Mengoptimalkan peran KHDTK sebagai pusat pengembangan Iptek kehutanan.
- Meningkatkan kualitas data dan layanan KHDTK dan laboratorium kehutanan untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
- Peningkatan multiplier effect sektor kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- Berkontribusi secara signifikan pada pencapaian prioritas nasional di sektor kehutanan

Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran strategis yang akan dicapai adalah :

- Penguatan rekomendasi kebijakan kehutanan, dengan indikator tersedianya rekomendasi kebijakan strategis tahunan.

- Terbangunnya model pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK-HP untuk pendidikan, riset, dan inovasi.
- Pengembangan bioekonomi hasil hutan, dengan indikator peningkatan kualitas pengujian laboratorium dan data biodiversitas sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada level program, P2HB mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dengan sasaran program Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian dan indikator kinerja program Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional.

Kegiatan Tahun 2026 Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan yang mendukung prioritas nasional adalah **Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan (RDK.OP)** yang masuk dalam **PN 2** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.

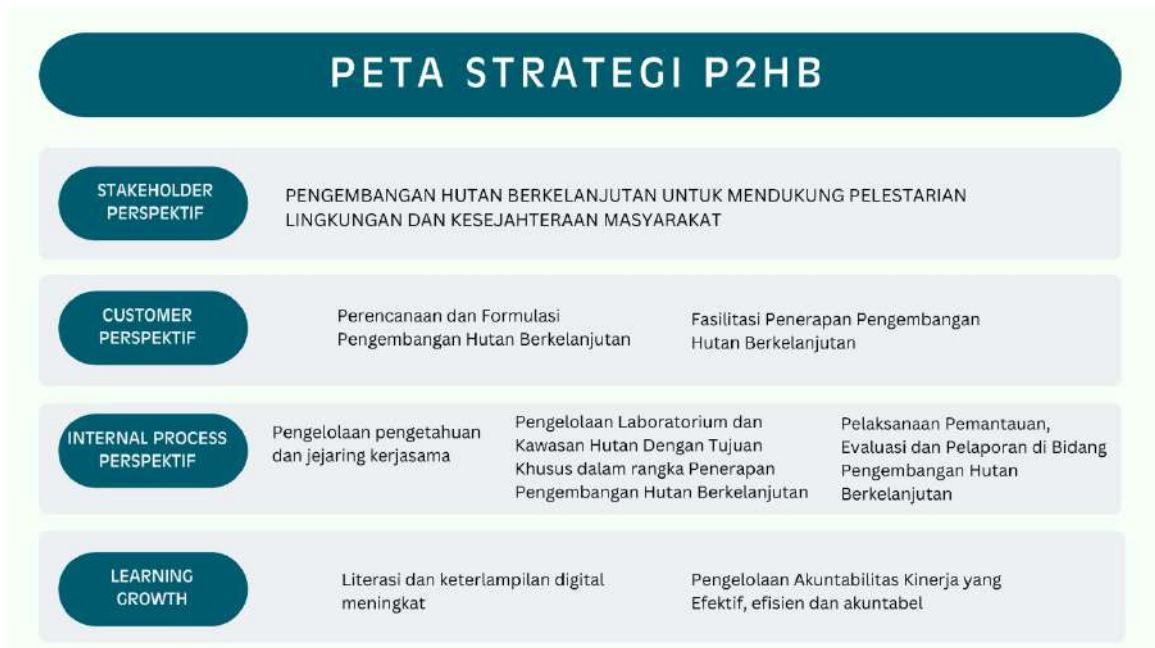
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Air, Ekonomi Syariah, ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

KINERJA SASARAN UTAMA PRIORITAS NASIONAL	INTERNALISASI KINERJA KEMENTERIAN	INTERNALISASI KINERJA SEKETARIAT JENDERAL	INTERNALISASI KINERJA P2HB
Pertumbuhan ekonomi hijau dan kehutanan melalui tata kelola sumberdaya hutan yang produktif dan lestari	Terimplementasinya kebijakan pembangunan kehutanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Efektivitas penerapan kebijakan teknis kehutanan, hilirisasi, serta pengelolaan keanekaragaman hayati	Layanan laboratorium kehutanan bidang pengembangan hutan berkelanjutan

Gambar 12. Dukungan Arah Kejjakan P2HB terhadap Prioritas Nasional

3.2. PETA STRATEGI P2HB

Peta Strategi P2HB menggambarkan hubungan sebab-akibat yang terstruktur antara penguatan kapasitas internal, efektivitas proses kelembagaan, kualitas layanan pendukung kebijakan, hingga kontribusi strategis P2HB terhadap pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh peran P2HB berkontribusi secara nyata dalam mendukung implementasi kebijakan kehutanan yang berdampak.



Gambar 13. Peta Strategi P2HB

3.3. TARGET KEGIATAN 2026

Sebagai unit pendukung teknis dibawah Sekretariat Jenderal, P2HB mendukung Sasaran Program Setjen “Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian”, pada periode 2025-2029

ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Setjen “Indeks Implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional”.

Tabel 5. IKP P2HB Tahun 2026

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T4. SS4.SP3. Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis Kementerian	T4. SS4.1.SP3.1. Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional	2 Poin

Berdasarkan cascading kinerja, sasaran program Setjen diturunkan ke dalam sasaran kegiatan P2HB dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pada tingkatan IKK (satuan persen) akan melakukan pengukuran implementasi kebijakan UKE I pada 2 (dua) aspek, yaitu 1) Implementasi kebijakan, serta 2) Evaluasi dan keberlanjutan kebijakan. Sementara untuk

target IKP (satuan poin) dihasilkan dari konversi pengukuran peresentase dari level IKK menjadi poin.

Sebagai Eselon II Teknis, P2HB juga mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang memiliki sasaran program Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian dan Indikator (UKE I) yaitu Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025-2029 dalam mendukung pembangunan nasional.

Tabel 6. IKK P2HB Tahun 2026

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026
Pengembangan Hutan Berkelanjutan	Terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat	Efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati	72%

Target kinerja Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan di tahun 2026 adalah efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan target 72%.

Upaya yang dilakukan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan dalam meningkatkan

produktivitas hutan di tahun 2026 adalah dengan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan hutan berkelanjutan.

Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan perbaikan proses bisnis dalam meningkatkan kontribusi subsektor kehutanan, hilirisasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Tabel 7. Indikator Kinerja P2HB 2026

KRO/RO/KOMPONEN	TARGET 2026
ABV. Kebijakan Bidang Kehutanan	9 Rekomendasi
001. Rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan	9 Rekomendasi
051. Perencanaan dan formulasi pengembangan kehutanan	5 Rekomendasi
052. Fasilitasi penerapan pengembangan kehutanan	4 Rekomendasi
CDK-OP. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14 Unit
001. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	14 Unit

KRO/RO/KOMPONEN	TARGET 2026	
RDK-OP. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7	Layanan
001. Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	7	Layanan
051. Pengelolaan Laboratorium Terpadu	4	Layanan
052. Pengelolaan Laboratorium Lapangan	3	Layanan
EBA.994. Layanan Perkantoran		
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan

Arsitektur kinerja P2HB dibangun secara berjenjang mulai dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga Kelompok Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Alur logis ini memastikan bahwa setiap kegiatan, output, dan indikator yang disusun dalam Renja berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dalam Renstra 2026–2029 serta Prioritas Nasional terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, hilirisasi hasil hutan, dan penguatan lingkungan hidup. Secara sistematis, arsitektur kinerja P2HB menggambarkan hubungan sebab-akibat antara input, proses, output, hingga dampak yang dihasilkan.

Pada tingkat paling atas, IKK menggambarkan hasil (outcome) yang ingin dicapai P2HB melalui kebijakan, rekomendasi teknis, layanan laboratorium, dan fasilitasi pengelolaan KHDTK. IKK merepresentasikan dampak langsung dari seluruh kegiatan yang dilakukan, seperti peningkatan efektivitas kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan, meningkatnya kualitas layanan uji laboratorium untuk mendukung hilirisasi, serta meningkatnya efektivitas pengelolaan KHDTK sebagai laboratorium lapangan. IKK menjadi dasar evaluasi keberhasilan kinerja P2HB secara tahunan.

Untuk mencapai IKK tersebut, P2HB menetapkan Kelompok Rincian Output

(KRO) sebagai keluaran utama kegiatan. KRO merupakan produk kinerja strategis yang secara langsung memengaruhi pencapaian outcome. KRO P2HB antara lain berupa:

1. Penyediaan rekomendasi pengembangan hutan berkelanjutan (kebijakan, pedoman teknis, metodologi, dan instrumen analisis).
2. Fasilitasi pengelolaan KHDTK sebagai laboratorium lapangan melalui standarisasi tata kelola, pemanfaatan, dan monitoring.
3. Penyediaan layanan laboratorium untuk mendukung kualitas hasil hutan dan instrumen kehutanan.

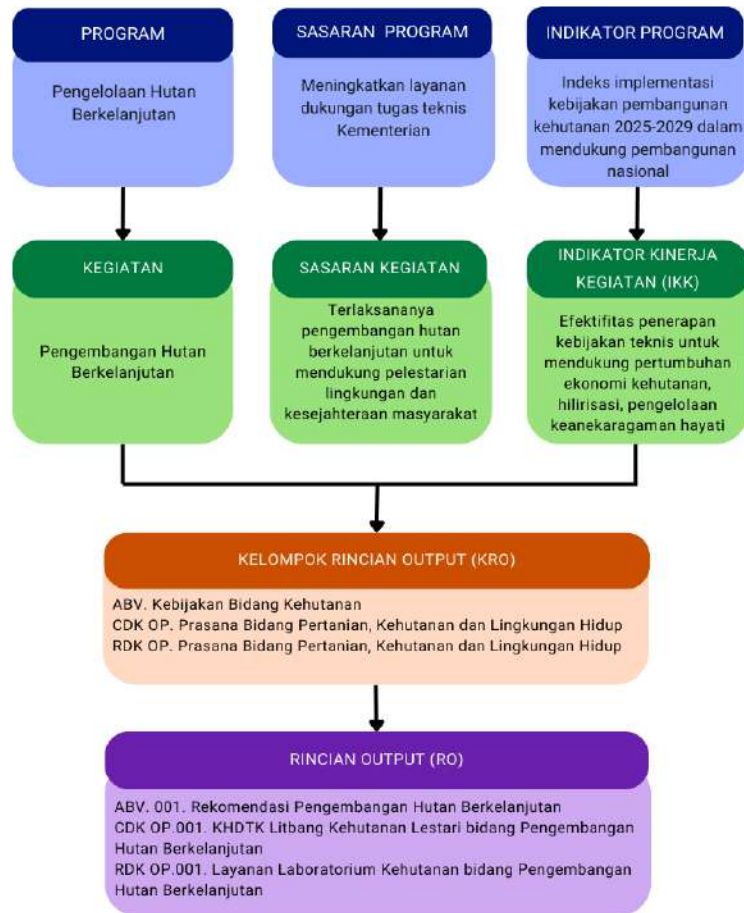
Pada lapis berikutnya terdapat Rincian Output (RO), yaitu output teknis yang merupakan produk nyata dari pelaksanaan kegiatan di lapangan. RO menggambarkan sebuah proses yang dapat diukur secara langsung melalui volume, jenis layanan, dan penyelesaian pekerjaan. RO bersifat operasional dan merupakan bagian paling konkret dari arsitektur kinerja. RO P2HB meliputi:

1. Rekomendasi kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan.
2. Unit pengelolaan KHDTK lestari bidang pengembangan hutan berkelanjutan.
3. Layanan pengujian laboratorium kehutanan bidang pengembangan hutan berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan P2HB adalah Pengembangan Hutan Berkelanjutan, dengan sasaran kegiatan terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program pengelolaan hutan berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas kebijakan teknis kehutanan, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB)

pada tahun 2026 melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan. Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, aplikatif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung hilirisasi industri kehutanan, peningkatan daya saing produk hasil hutan, ketahanan pangan, serta penguatan tata kelola sumber daya hutan.

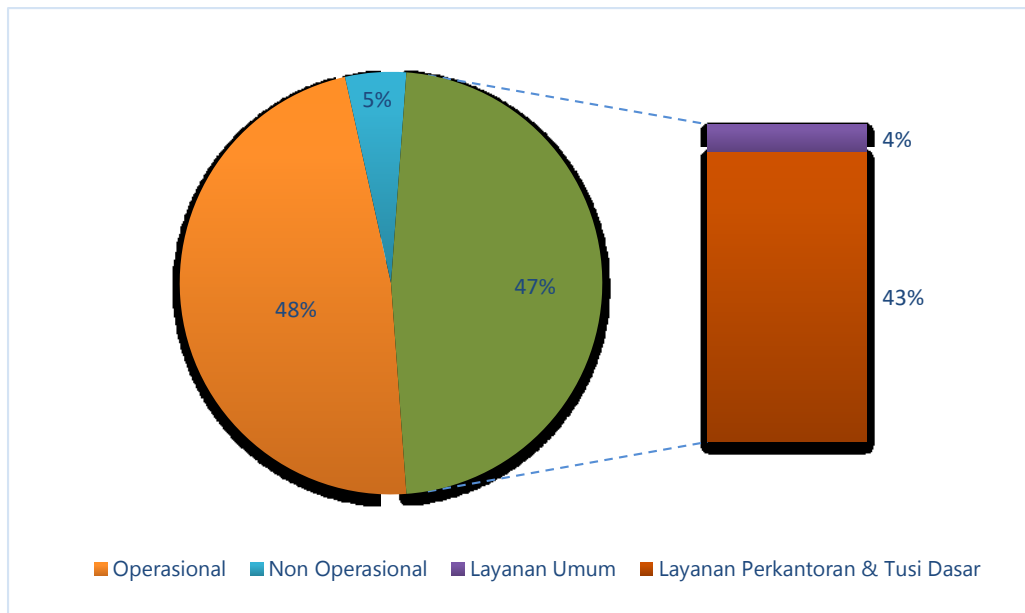


Gambar 14. Arsitektur Kinerja P2HB

Mengingat Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) berada dalam satu DIPA yakni DIPA KP Sekretariat Jenderal, maka P2HB mendukung pencapaian kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Jenderal, dengan sasaran kegiatan yakni terlaksananya pengembangan hutan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4. PENDANAAN TAHUN 2026



Gambar 15. Pagu P2HB Tahun 2026 berdasarkan Jenis Belanja

Pagu Anggaran sesuai dengan SP DIPA 143.01.693521/2026 tanggal 1 Desember 2025, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan mendapat alokasi sebesar Rp.17.042.992.000,- dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) Rp. 16.024.992.000,- dan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) Rp.1.000.000.000,-.

Dalam mendukung prioritas direktif Presiden sesuai dengan Memorandum Sekretariat Jenderal Nomor M.45/STEJEN/ROCAN/REN.01/12/2025 tanggal 16 Desember 2025, P2HB diminta untuk melakukan selfblocking dan memindahkan sebagian anggaran ke RO khusus. Pagu P2HB selanjutnya menjadi Rp. 14.599.683.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.13.599.683.000,- dan PNBP sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Berdasarkan jenis belanja pagu P2HB terdiri dari Belanja Operasional dan Non Operasional, dimana Belanja Operasional P2HB adalah sebesar Rp.13.298.937.000,-

yang terdiri dari Layanan Umum (RM: Rp. 156.976.000,- dan PNBP:Rp. 1.000.000.000), serta Layanan Perkantoran (RM: Rp.12.1441.961.000,-).

P2HB memperoleh anggaran melalui DIPA Sekretariat Jenderal. Namun, optimalisasi pendanaan dilakukan melalui:

- Pemanfaatan PNBP dari layanan laboratorium kehutanan;
- Pengembangan kerja sama dengan mitra riset, lembaga donor, dan CSR perusahaan kehutanan;
- Pengajuan proposal pendanaan kepada Bappenas dan Kemenhut untuk program prioritas.

Optimalisasi pendanaan dilakukan melalui eksplorasi berbagai skema pendanaan alternatif di luar APBN, seperti hibah, dukungan pendanaan bilateral/multilateral, serta program kerja sama dengan sektor swasta dan LSM. P2HB juga merancang sistem insentif untuk mendorong keterlibatan pihak ketiga dalam

mendukung pelaksanaan program hutan berkelanjutan, khususnya pada aspek edukasi publik, transfer teknologi, dan pengembangan model-model bisnis berbasis konservasi.

Untuk efisiensi pendanaan, P2HB menerapkan strategi penganggaran berbasis kinerja dan hasil (*performance-based budgeting*), penjadwalan ulang kegiatan agar tidak tumpang tindih dan fokus pada outcome, dan kolaborasi lintas unit kerja untuk sinergi kegiatan dan berbagi sumber daya.

Tahun 2026 P2HB akan melaksanakan 2 program, yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Dukungan Manajemen P2HB terdapat alokasi belanja operasional – tuisi dasar yang dialokasikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan teknis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kehutanan, hilirisasi, pengelolaan keanekaragaman hayati. Adapun pendanaan dan struktur anggaran P2HB tahun 2026 per program dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pendanaan P2HB Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/RO	PAGU
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.300.746.000
7259. Pengembangan Hutan Berkelanjutan	1.300.746.000
ABV. Rekomendasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	243.839.000
CDK. KHDTK Litbang Kehutanan Lestari bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	558.000.000
RDK. Layanan Laboratorium Kehutanan bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan	498.907.000
Program Dukungan Manajemen	13.298.937.000
7302. Penyelenggaraan Data dan Informasi Kehutanan	13.298.928.000
EBA. 962. Layanan Umum Kantor Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	1.156.976.000
EBA. 994. Layanan Perkantoran	12.141.961.000
TOTAL	14.599.683.000



BAB IV

PENUTUP

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan P2HB selama satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis P2HB Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan sektor kehutanan.

Renja P2HB Tahun 2026 memuat arah kebijakan, strategi, sasaran kinerja, serta rencana kegiatan dan pendanaan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2HB dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan pengembangan hutan berkelanjutan, pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), serta penyediaan layanan laboratorium kehutanan. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan P2HB dapat berkontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan kehutanan yang efektif, berbasis data ilmiah, serta berorientasi pada pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Renja ini memerlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unit kerja di lingkungan P2HB serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan Kementerian Kehutanan maupun pihak eksternal lainnya. Koordinasi, integrasi, dan kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Renja ini akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut juga akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Renja P2HB Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan hutan yang berkelanjutan, peningkatan pemanfaatan kawasan hutan secara produktif dan lestari, serta penguatan dukungan kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Metode Perhitungan Kinerja Sekretariat Jenderal

Indikator dari P2HB merupakan mandat yang diberikan untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan pembangunan kehutanan pada tahun 2025-2029. Indikator program tersebut yaitu Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029 dalam Mendukung Pembangunan Nasional (Sekretariat Jendral Kementerian Kehutanan, 2025).

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025–2029 merupakan instrumen penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional selama periode tersebut. Metode pengukuran IKP ini mengacu pada Indeks Kualitas Kebijakan yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI), khususnya pada (1) aspek implementasi dan (2) aspek evaluasi kebijakan dan keberlanjutan dengan perbedaan terletak pada indikator dari masing-masing aspek pengukuran dari masing-masing indikator oleh ketiga pusat pengembangan di Kementerian Kehutanan.

Konteks Indeks implementasi kebijakan pembangunan kehutanan 2025–2029 adalah alat ukur atau indikator yang dikembangkan untuk menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan pembangunan kehutanan selama periode tersebut dijalankan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap tujuan pembangunan nasional. Indeks ini berfungsi untuk:

- Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan kehutanan, baik ditingkat nasional maupun daerah.
 - Mengevaluasi konsistensi antara kebijakan kehutanan dengan arah pembangunan nasional, termasuk aspek keberlanjutan, ekonomi hijau, mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
 - Menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi ke depan, agar pembangunan kehutanan lebih selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, RPJMN 2025-2029, serta agenda pembangunan lainnya.
2. Dasar Pengukuran Penilaian dilakukan terhadap (1) implementasi kebijakan dan (2) aspek evaluasi kebijakan dan keberlanjutan terhadap tiga dari lima kebijakan yang tercantum dalam Renstra Pembangunan Kehutanan 2025–2029, yaitu: (1) Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air; (2) Penguasaan hutan yang berkeadilan; dan (3) Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan dan energi.

3. Sumber Data

Hasil penilaian efektivitas penerapan kebijakan teknis yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi, Pusat Pengembangan Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Hutan.

4. Metode Pengumpulan Data

Aspek yang diukur oleh ketiga Pusat Pengembangan dalam mengukur indikator kinerja kegiatan masing-masing pusat pengembangan di Kementerian berupa: 1) aspek implementasi kebijakan, serta (2) aspek evaluasi kebijakan dan keberlanjutan. Sementara, untuk target IKP (satuan berupa poin) dihasilkan dari konversi pengukuran persentase dari

rata-rata nilai IKK dari ketiga Pusat Pengembangan di Kementerian menjadi poin. Tabel Konversi IKK ke IKP Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029.

IKK (Persen)	IKP (Poin)
70% ≤ Nilai < 72%	1
72% ≤ Nilai < 74%	2
74% ≤ Nilai < 76%	3
76% ≤ Nilai < 78%	4
≥ 78%	5

Lampiran 2. Rekomendasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang Dihasilkan P2HB tahun 2025

KEGIATAN	NO	OUTPUT KEGIATAN	HASIL REKOMENDASI
Perencanaan Dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan			
Optimalisasi Peningkatan Produksi Getah Pinus Nasional Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Kehutanan	1	Rekomendasi	a. Policy Brief "Tata Kelola Penyediaan Bahan Baku Berkelanjutan untuk Hilirisasi Getah Pinus"
		Prosiding	b. Prosiding FGD Tata Kelola Pinus dan Getah Pinus Indonesia
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP)	2	Rekomendasi	a. Policy Paper "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan PUP pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)"
			b. Policy Brief "Kebijakan Pembaruan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP)" pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)"
		Prosiding	c. Prosiding FGD Urgensi dan Relevansi PUP dalam Evaluasi Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d. Prosiding FGD Urgensi dan Reviu Kebijakan (PUP) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Propinsi Kalimantan Timur

KEGIATAN	NO	OUTPUT KEGIATAN		HASIL REKOMENDASI
			e. Prosiding FGD Urgensi dan Reviu Kebijakan PUP pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Propinsi Riau f. Prosiding FGD Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	
Pengelolaan Technical Knowledge Management Hub (TKMH)	3	Rekomendasi	a. Policy Brief "Pengembangan Hub Pengetahuan dan Kerja Sama Kehutanan sebagai Fondasi Kebijakan Berbasis Bukti"	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Jembatan/Hub Pengetahuan dan Kerjasama
		Prosiding	b. Prosiding Penguatan Jejaring Kerja dalam Mendukung Pembangunan Platform Technical Knowledge Management Hub Kehutanan c. Prosiding Penguatan Jejaring Kerja dalam Mendukung Pembangunan Platform Technical Knowledge Management Hub Kehutanan d. Platform TKMH Kehutanan	
Kajian tentang Kewajiban Identifikasi Jenis (Kayu) dalam rangka Pemasaran Produk Hasil Hutan (Kayu) Berorientasi Ekspor Fasilitasi penerapan pengembangan kehutanan.	4	Rekomendasi	a. Policy Paper " Analisis Kesesuaian Nama Dagang sesuai Jenis Penggunaan yang Berimplikasi terhadap Penerimaan Negara"	Rekomendasi Kebijakan Kesesuaian Nama Dagang sesuai Jenis Penggunaan yang Berimplikasi terhadap Penerimaan Negara
			b. Policy Brief "Analisis Kesesuaian Nama Dagang sesuai Jenis Penggunaan yang Berimplikasi terhadap Penerimaan Negara"	
		Prosiding	c. PROSIDING "Kesesuaian Nama Dagang dan Nama Ilmiah pada Tata Kelola Hasil Hutan dalam Perspektif Pengelolaan Hutan Berkelanjutan"	

KEGIATAN	NO	OUTPUT KEGIATAN		HASIL REKOMENDASI
Fasilitasi Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan				
Profiling dan Updating Hasil Hutan Bukan Kayu	5	Rekomendasi	a. Policy Brief "Optimalisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak"	Rekomendasi kebijakan Optimalisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
		Prosiding	b. Prosiding "Optimalisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak"	
Keanekaragaman Sumber Pangan Hutan : Studi Awal di KHDTK Carita	6	Rekomendasi	a. Policy Brief "Penguatan Peran Pangan Hutan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Keanekaragaman Hayati Studi Awal di KHDTK Carita, Provinsi Banten"	1. Rekomendasi kebijakan Penguatan basis data pangan hutan
				2. Rekomendasi Kebijakan Integrasi pangan hutan dalam pengelolaan hutan multifungsi
				3. Rekomendasi Kebijakan Penguatan pengetahuan lokal dan transfer pengetahuan
				4. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk pangan hutan
		Prosiding	b. Prosiding FGD pengembangan studi pangan hutan	
			c. Prosiding FGD validasi hasil studi pangan hutan	
Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian (HP)	7	Rekomendasi	a. Policy Brief "Pengembangan Aren (Arenge pinnata) di Hutan Penelitian Sobang Penguatan Energi Terbarukan, Multiusaha Kehutanan, dan Ekonomi Masyarakat"	Rekomendasi Kebijakan : 1. Menetapkan HP Sobang sebagai lokasi percontohan pengembangan aren berbasis hutan penelitian.

KEGIATAN	NO	OUTPUT KEGIATAN	HASIL REKOMENDASI
		b. Policy Paper "Penanaman Aren (Arenga pinnata) di Hutan Penelitian Sobang Integrasi Perbenihan Tanaman Hutan, Energi Terbarukan, dan Pemberdayaan Masyarakat"	<p>2. Memperkuat integrasi antara BPTH, lembaga riset, dan industri energi dalam satu rantai nilai aren.</p> <p>3. Mendorong skema kemitraan inklusif antara pengelola hutan, masyarakat lokal, dan BUMN energi.</p> <p>4. Mengembangkan hilirisasi produk HHBK aren, khususnya gula aren dan turunannya, sebagai penyangga ekonomi sebelum fase bioenergi.</p>
		Prosiding	
		c. Prosiding Pelatihan Aplikasi Konsep Climate, Biodiversity, Socio-Culture, And Economic Concept (CBSC) untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
		d. Prosiding Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian (HP) Lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	
		e. Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Expose Tahunan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian (HP) Lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	
		f. Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Rencana Aksi Pengelolaan KHDTK Benakat Berkelanjutan : Rehabilitasi Hutan Benakat Berbasis Green Koridor (Gajah dan	

KEGIATAN	NO	OUTPUT KEGIATAN		HASIL REKOMENDASI
			Harimau) bersama Masyarakat	
Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk Optimalisasi Rantai Nilai Kehutanan	8	Rekomendasi	a. Policy Brief "Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan untuk Optimalisasi Rantai Nilai Kehutanan"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi khusus mengenai laboratorium kehutanan 2. Efisiensi layanan dan pengelolaan 3. Modernisasi peralatan dan sistem manajemen laboratorium, 4. Penguatan sistem mutu (akreditasi), 5. Jejaring dan kolaborasi lintas sektor (shared facility, riset kolaboratif) 6. Integrasi dalam rantai nilai kehutanan, pusat rujukan nasional 7. Branding layanan laboratorium unggulan
		Prosiding	b. Prosiding Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Laboratorium Kehutanan Lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	
			c. Prosiding Expose Tahunan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan Lingkup Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	

Lampiran 3. KHDTK/Hutan Penelitian P2HB

NO	DASAR HUKUM KHDTK/HP	LOKASI	LUAS (Ha)
1	KHDTK Carita		
	<ul style="list-style-type: none"> Berdiri tahun 1955 SK MenLHK No. 990 tahun 2024 tentang penetapan KHDTK Carita untuk penelitian dan Pengembangan Kehutanan BSILHK, KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 	3.469,33
2.	KHDTK Cikampek:		
	<ul style="list-style-type: none"> Berdiri tahun 1937 SK MenLHK No. 987 tahun 2024 tentang penetapan KHDTK Cikampek untuk penelitian dan Pengembangan Kehutanan BSILHK, KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat 	66,57
3.	KHDTK Haurbentes		
	<ul style="list-style-type: none"> Berdiri tahun 1940 SK MenLHK No. 985 tahun 2024 tentang penetapan KHDTK Haurbentes untuk penelitian dan Pengembangan Kehutanan BSILHK, KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 	95,38
4.	KHDTK Pasir Awi, Leuwiliang – Bogor		
	<ul style="list-style-type: none"> Berdiri tahun 1938 SK MenLHK No. SK.82/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/tentang penetapan KHDKT Pasir Awi 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 	24,20
5.	KHDTK Arcamanik, Bandung		
	<ul style="list-style-type: none"> Berdiri tahun 1954 SK MenLHK No. 989 tahun 2024 tentang penetapan KHDTK Arcamanik untuk penelitian dan Pengembangan Kehutanan BSILHK, KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Cimencyan/ UjungBerung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat 	25,20
6	KHDTK Hambala		
	<ul style="list-style-type: none"> Berdiri tahun 1993 SK.136/Menhut-II/2004 	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT 	509,42
7	KHDTK Samboja		
	<ul style="list-style-type: none"> Berdiri tahun SK. 1569/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2022 	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab Kutai Kartanegara, Desa Semoi Dua, Kec. Sepaku, Kab, Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 	3.517,53
8	KHDTK Benakat		
	<ul style="list-style-type: none"> Berdiri tahun 1979 SK. 111/Menhut-II/2004, tanggal 9 April 2004 	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Talang Ubi, Ds. Sungai Baung dan Ds. Benakat Minyak Kab. Muara Enim, 	3.724,80

NO	DASAR HUKUM KHDTK/HP	LOKASI	LUAS (Ha)
		<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Sumatera Selatan 	
9	KHDTK Gombong		
	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiri tahun 1996 • SK.345/Menhut-II/2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah, Kab. Kebumen, Kec. Sempor, Desa Somagede 	191
10	HP Pasirhantap	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Ginanjar • Kecamatan Ciambar • Kabupaten Sukabumi • Provinsi Jawa Barat 	35
11	HP Cikole	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Cikole • Kecamatan Lembang • Kabupaten Bandung Barat • Provinsi Jawa Barat 	36,87
12	HP Gunung Dahu	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pabangbon (Kecamatan Leuwiliang) • Desa Bantar Karet (Kecamatan Nanggung) • Kabupaten Bogor • Provinsi Jawa Barat 	250
13	HP Sobang	<ul style="list-style-type: none"> • Desa/Kelurahan Karang Bolong • Kecamatan Cigeulis • Kabupaten Pandeglang • Provinsi Banten. 	167,45
14	HP Dramaga	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Situ Gede • Kecamatan Bogor Barat • Kota madya Bogor • Provinsi Jawa Barat 	60

Peta Sebaran KHDTK Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

